

PERLAKUAN DAN PEMBERIAN FASILITAS KEPADA PENANAM MODAL MENURUT PRESPEKTIF UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Bonatua Edynata Manihuruk ^{*)}

Budiman Ginting ^{)}**

Mahmul Siregar ^{*)}**

ABSTRACT

Indonesia has ratified the Agreement on TRIM's (Agreement on Trade Related Investment Measures) through the implementation of Act 7 of 1994 on Foreign Investment, which of course affects how the government's treatment for both foreign and domestic investors, how the facility by the government to investors, and how government oversight of the investment activity.

The method used in writing this paper is to study the data collected by the library (library research), which conducted a study using data from a variety of reading materials such as legislation, books, articles and internet are considered relevant to the issues discussed in the author this thesis.

In investment activities, the Government of Indonesia implement the principle of equal treatment to foreign and domestic investors, even applies to all investors regardless of their country of origin investors. However, Article 6 paragraph (2), Act 25 of 2007 allows the government to provide the specific requirements of different investors who have certain privileges based on an agreement with Indonesia to a particular country, such as AFTA, ACFTA. Facilities / convenience provided by the government to investors were ten facilities, which should be adjusted according to the effectiveness and necessity of the investors in the business he started. Investment coordinating agency (BKPM) also plays running integrated one-stop service system (PTPS) as was stipulated in Presidential Regulation of BKPM No. 27 of 2009 concerning integrated one-stop service in the field of investment.

Kata kunci: perlakuan, fasilitas, modal.

PENDAHULUAN

Dewasa ini perdagangan internasional dipengaruhi oleh sistem, ketentuan dan mekanisme WTO (*World Trade Organizations*) dengan bentuk salah satu aturan main adalah TRIMs (*Agreement on Trade Related Investment Measures*). Atas dasar ketentuan tersebut, kegiatan penanaman modal di Indonesia secara logis-yuridis terikat kepada prinsip-prinsip penanaman modal internasional dari WTO dan TRIMs yaitu prinsip *nondiskriminasi*, prinsip *most favoured nations* (MFN), *prinsip national treatment*.¹

Pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal harus didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga dapat meningkatkan daya tarik sehingga Indonesia menjadi negara tujuan investasi.

Kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang Penanaman Modal yang mengatur hal-hal yang penting, yang mencakup semua kegiatan penanaman modal langsung disemua sektor yang meliputi kebijakan dasar penanaman modal, bentuk keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dengan pengaturan mengenai

^{*)} Penulis.

^{**)} Dosen Pembimbing I.

^{***)} Dosen Pembimbing II.

¹Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 109-110.

pengembangan penanaman modal dan tanggung jawab penanam modal serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang didalamnya mengatur mengenai kelembagaan urusan penanaman modal dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, ditentukan bahwa investor, baik domestik maupun asing yang menanamkan investasinya di Indonesia diberikan fasilitas atau kemudahan-kemudahan. Fasilitas penanam modal itu diberikan kepada penanam modal yang:² 1. Melakukan perluasan usaha; atau, 2. Melakukan penanaman modal baru. Kriteria investor yang akan mendapat fasilitas penanam modal telah ditentukan oleh Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007.

Apabila salah satu kriteria itu dipenuhi, maka telah dianggap cukup bagi pemerintah untuk memberikan fasilitas atau kemudahan kepada investor. Ada sepuluh bentuk fasilitas atau kemudahan yang diberikan kepada penanam modal (investor) asing maupun domestik.

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan pertimbangan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan oleh negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mengharuskan pengaturan yang lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi dan fasilitas perizinan impor. Pemberian fasilitas tersebut setidaknya merupakan upaya untuk mendorong penyerapan tenaga kerja.

Dalam pemberian fasilitas hak atas tanah kepada penanam modal, yang justru semakin banyak memunculkan kasus-kasus pertanahan. Semakin bertambahnya status tanah-tanah milik masyarakat adat maupun perorangan dengan status tanah sengketa. Hal tersebut seharusnya menjadi tanda tanya besar dan juga menjadi perhatian pemerintah. Bahkan dengan terungkapnya Kasus Mesuji, yang memakan

korban jiwa baik dari masyarakat setempat dan dari pihak perusahaan karena status kepemilikan lahan yang tidak jelas. Hal tersebut disebabkan oleh Pemerintah yang tidak melakukan kontrol yang berkala atau terus menerus. Pemerintah seharusnya dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat, penuh tanggung jawab dan bijaksana khususnya dipandang dari segi hukum ekonominya, baik itu Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah yang telah diberi kewenangan khusus oleh UU Otonomi Daerah.

PERUMUSAN MASALAH

Penelitian dalam jurnal ini difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif mengenai Penanaman Modal oleh karena itu jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative dengan tipe yuridis normative.

Adapun masalah yang dibahas dalam jurnal ini yakni bagaimana perlakuan yang diberikan pemerintah kepada penanam modal berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan bagaimana ketentuan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada penanam modal berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, kemudian membawa permasalahan selanjutnya bagaimana pengawasan pemerintah terhadap penanam modal yang diberikan fasilitas penanaman modal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Alasan utama pemerintah dalam menetapkan kebijakan penanaman modal sesuai dengan yang telah diatur di dalam UU tersebut lebih beralasan kepada ketahanan dan pembangunan perekonomian nasional yakni untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal dalam penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Kebijakan tersebut dilaksanakan pemerintah dengan cara memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

²Salim, HS, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 273.

Perlakuan terhadap penanam modal berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 didasarkan prinsip perlakuan sama dan tidak membedakan asal negara (Pasal 3 ayat (1) huruf d). Pemerintah memberikan perlakuan sama terhadap penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri (Pasal 4 ayat (2)). Demikian juga perlakuan sama diberikan kepada seluruh investor tanpa memandang negara asalnya (Pasal 6 ayat (1)). Akan tetapi, terdapat pengecualian atas perlakuan sama yang memungkinkan pemerintah memberi persyaratan yang berbeda kepada investor tertentu yang mempunyai hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007) seperti karena adanya perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah asing yang bersifat regional contohnya : *ASEAN Free Trade Agreement* (AFTA), *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA). Perlakuan sama yang diberikan dalam penyelenggaraan penanaman modal tersebut harus tetap berpihak kepada kepentingan nasional.

Fasilitas penanaman modal diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha baik investor asing maupun domestik yang memenuhi kriteria penerima fasilitas penanaman modal pada bidang-bidang yang telah ditentukan oleh pemerintah. UU No. 25 Tahun 2007, Pasal 18 memuat ada sepuluh bentuk fasilitas atau kemudahan yang diberikan kepada penanam modal (investor) asing maupun domestik. Kesepuluh fasilitas yang disajikan itu adalah:

1. Fasilitas pajak penghasilan (PPh)

Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan ini dilakukan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu.³ Fasilitas pajak penghasilan yang diberikan kepada penanam modal diberlakukan berdasarkan kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh pemerintah yang pengaturannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2. Pembebasan atau keringanan bea impor barang modal yang belum bisa diproduksi di dalam negeri.

Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal adalah melepaskan kewajiban atau pengurangan beban dari investor untuk membayar bea masuk atas barang modal yang dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia. Pasal 4 huruf b Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 telah ditentukan jenis-jenis barang yang dibebaskan dari bea masuk impor. Jenis-jenis barang yang dibebaskan dari pembebasan atau keringanan bea impor adalah barang modal, mesin; atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum bisa diproduksi di dalam negeri.

3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi.

4. Pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor barang modal atau mesin, yang belum dapat diproduksi di dalam negeri,

5. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat. Fasilitas penyusutan atau amortisasi merupakan kemudahan yang diberikan kepada investor, berupa pengurangan atau penghapusan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh investor, yang digunakan dalam pelaksanaan penanaman modal.⁴

6. Keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB) Keringanan pajak bumi dan bangunan merupakan keringanan yang diberikan oleh pemerintah kepada investor dalam penggunaan hak atas tanah. PBB merupakan pajak dikenakan atas bumi dan bangunan. Keringanan itu, berupa pengurangan sebesar 50% atas pajak bumi dan bangunan (PBB) selama delapan tahun, sejak diperoleh izin peruntuan atas hak atas tanah.

7. Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan.

Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan hanya dapat diberikan kepada penanam modal baru yang

³Lihat Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (4)

⁴Salim, HS, Budi Sutrisno, *Op.Cit*, hlm. 330.

merupakan industri pioner. Industri pioner merupakan industry yang mempunyai ciri-ciri:

- a) Memiliki keterkaitan yang luas dengan yang lainnya;
- b) Memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi. Eksternalitas adalah jika investasi terjadi lintas batas daerah atau dampaknya bisa mengenai daerah tetangga lokasi investasi;
- c) Memperkenalkan teknologi baru; serta
- d) Memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional (Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal).

8. Fasilitas hak atas tanah

Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, bersimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.⁵ Tanah sendiri adalah tempat kita dalam melakukan segala aktifitas kehidupan kita sehingga perekonomian pun tidak dapat terlepas dari pemanfaatan tanah sebagai tempat beraktifitas. kemudahan pelayanan dan perizinan hak atas tanah yang dapat diberikan dan diperpanjang sekaligus dapat diperbaharui kembali.

9. Fasilitas keimigrasian

Fasilitas imigrasi merupakan kemudahan yang diberikan kepada investor dalam kaitan dengan hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian). Bertujuan untuk Penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modal; Penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan purna jual; dan, Calon penanaman modal yang akan melakukan peninjauan penanaman modal.

10. Perizinan impor.

Fasilitas perizinan impor merupakan kemudahan yang diberikan kepada investor

untuk memasukkan barang ke Indonesia. Fasilitas perizinan impor ini telah ditentukan dalam Pasal 21 huruf b dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Setiap fasilitas ditawarkan secara terbuka kepada setiap penanam modal dan harus disesuaikan menurut efektifitas dan kebutuhan dari penanam modal dalam usaha yang dirintisnya. Hal tersebut juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Pemerintah telah mengadakan pembagian kewenangan dalam urusan penanaman modal sesuai dengan ruang lingkupnya yakni lintas provinsi menjadi urusan pemerintah, lintas kabupaten/kota menjadi urusan provinsi, berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan pengawasannya, pemerintah dengan kebijakannya membentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diberi kewenangan persetujuan penanaman modal dalam Pasal 27, 28 dan 29 UU No. 25 Tahun 2007.

Instrument pelaksanaannya dilakukan melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yaitu laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal (Pasal 1 angka 16, Peraturan Kepala BKPM No. 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal), pemantauan melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi LKPM, dan dari sumber informasi lainnya (Pasal 6). Pemerintah juga memberlakukan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan telah menerapkan beberapa bentuk pembatasan yaitu menetapkan bidang-bidang usaha yang tertutup untuk kegiatan penanaman modal, penetapan syarat investasi minimal bagi perusahaan penanaman modal asing, pembatasan jangka waktu investasi, pembatasan terhadap hak-hak atas tanah, dan lainnya. Semuanya dilakukan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan nasional.

⁵Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia I*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 18.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlakuan terhadap penanam modal berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 didasarkan prinsip perlakuan sama dan tidak membedakan asal negara (Pasal 3 ayat (1) huruf d). Pemerintah memberikan perlakuan sama terhadap penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri (Pasal 4 ayat (2)). Demikian juga perlakuan sama diberikan kepada seluruh investor tanpa memandang negara asalnya (Pasal 6 ayat (1)). Akan tetapi, terdapat pengecualian atas perlakuan sama yang memungkinkan pemerintah memberi persyaratan yang berbeda kepada investor tertentu yang mempunyai hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007) seperti karena adanya perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah asing yang bersifat regional contohnya : *ASEAN Free Trade Agreement* (AFTA), *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA). Perlakuan sama yang diberikan dalam penyelenggaraan penanaman modal tersebut harus tetap berpihak kepada kepentingan nasional.
2. Fasilitas penanaman modal diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha baik investor asing maupun domestik yang memenuhi kriteria penerima fasilitas penanaman modal pada bidang-bidang yang telah ditentukan oleh pemerintah. UU No. 25 Tahun 2007, Pasal 18 memuat ada sepuluh bentuk fasilitas atau kemudahan yang diberikan kepada penanam modal (investor) asing maupun domestik. Kesepuluh fasilitas yang disajikan itu adalah: fasilitas pajak penghasilan (PPH), pembebasan atau keringanan bea impor barang modal yang belum bisa diproduksi di dalam negeri, pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi, pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor barang modal atau mesin, yang belum dapat diproduksi di dalam negeri, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB), pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan, fasilitas hak atas tanah, fasilitas keimigrasian, perizinan impor. Setiap fasilitas ditawarkan secara terbuka kepada setiap penanam modal dan harus disesuaikan menurut efektifitas dan kebutuhan dari penanam modal dalam usaha yang dirintisnya. Hal tersebut juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Pemerintah telah mengadakan pembagian kewenangan dalam urusan penanaman modal sesuai dengan ruang lingkupnya yakni lintas provinsi menjadi urusan pemerintah, lintas kabupaten/kota menjadi urusan provinsi, berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan pengawasannya, pemerintah dengan kebijakannya membentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diberi kewenangan persetujuan penanaman modal dalam Pasal 27, 28 dan 29 UU No. 25 Tahun 2007. Instrumen pelaksanaannya dilakukan melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yaitu laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal (Pasal 1 angka 16, Peraturan Kepala BKPM No. 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal), pemantauan melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi LKPM, dan dari sumber informasi lainnya (Pasal 6). Pemerintah juga memberlakukan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan telah menerapkan beberapa bentuk pembatasan yaitu menetapkan bidang-bidang usaha yang tertutup untuk kegiatan

penanaman modal, penetapan syarat investasi minimal bagi perusahaan penanaman modal asing, pembatasan jangka waktu investasi, pembatasan terhadap hak-hak atas tanah, dan lainnya. Semuanya dilakukan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan nasional.

B. SARAN

1. Perlakuan yang diberikan pemerintah kepada para penanam modal seharusnya sesuai dengan tujuan pelaksanaan penanaman modal di Indonesia dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional sehingga dapat menciptakan rasa aman dan percaya masyarakat terhadap pemimpinnya, dan wujud perekonomian yang dibangun oleh pemerintah harus lebih adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat sehingga kepentingan nasional tetap dikedepankan dan rakyat pun semakin sejahtera.
2. Diharapkan kepada pihak-pihak yang berkompeten dapat mensosialisasikan dan

memperjelas peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal/investasi yang berlaku secara transparan, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintah Daerah (otonomi daerah), Perseroan Terbatas (PT) dan lain sebagainya, sehingga masyarakat dapat menilai pemerintahnya berpihak pada kepentingan nasional atau lebih berpihak pada investor.

3. Sebaiknya instansi-instansi/lembaga-lembaga yang berwenang dalam hal pengelolaan investasi, dan juga masyarakat dapat memberi perhatian yang besar dan pengawasan yang benar terhadap proses berinvestasi, yang dimulai dari proses perizinan, pengoperasian usaha, perlakuan dan pemberian fasilitas, dan lain sebagainya kepada investor sehingga tidak terjadi hambatan terhadap pelaksanaan investasi yang besar dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan investor pun merasa yakin dan percaya serta nyaman berinvestasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia I*, Jakarta: Djambatan, 1999.
- Chalid, Pheni, *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi Tantangan dan Hambatan*, Jakarta: Mitra, 2005.
- K. Harjono, Dhaniswara, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Nasution, Bismar, *Hukum Kegiatan Ekonomi*, Bandung: Books Terrace & Library, 2007.
- Salim, HS. Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Untung, Hendrik Budi, *Hukum Investasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

WEBSITE

- [http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27742/5/Chapter I.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27742/5/Chapter%20I.pdf), (diakses pada 25 April 2012 pukul 10.52 WIB)
- [http://www.stialan.ac.id/artikel Zaenal Said.pdf](http://www.stialan.ac.id/artikel/Zaenal%20Said.pdf), (diakses pada 25 April 2012 pukul 10.52 WIB)
- <http://journal.unnes.ac.id/index.php/jejak/article/download/1468/1593>, (diakses pada 25 April 2012, pukul 10.56 WIB)
- [http:// www.binatalentabangsa.com/Saepudin Online](http://www.binatalentabangsa.com/Saepudin%20Online), (diakses pada 25 April 2012, pukul 10.56 WIB)
- http://www.fh.unair.ac.id/entryfile/Capital_Investmen_Law_S2.ppt, (diakses pada 25 April 2012, pukul 10.50 WIB)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.